

Ajakan Jokowi Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

JAKARTA (IM) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menggaungkan benci produk luar negeri merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan Kepala Negara.

Namun, di saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Bisa terobosan yang dimaksud Presiden, tetapi di komunikasi internasional relation itu bisa berbahaya," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/3).

Agus menyebut, pernyataan Jokowi itu bisa berdampak buruk lantaran saat ini Indonesia tengah meminta berbagai fasilitas dukungan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19. Ia khawatir ajakan presiden bakal berdampak melebar hingga ke hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara yang sedang bekerja sama.

"Sekarang kalau kita bicara benci itu menurut saya agak berbahaya. Memang itu heroik, tetapi buat hubungan internasional ini kan kedutaan-kedutaan besar kan di sini, pasti kan mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.

Menurut Agus, sebe-

lum menyampaikan pernyataan Presiden semestinya berkonsultasi dengan ahli komunikasi dan hubungan internasional. Dalam situasi pandemi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati.

Apalagi saat ini Indonesia masih mengimpor dari luar negeri karena kurangnya sumber daya dalam negeri. Misalnya, mengimpor sapi dari Australia dan Argentina lantaran sapi-sapi yang ada dalam negeri seluruhnya sudah terserap oleh industri susu, dan berbagai sektor lainnya.

"Saya khawatir perkataan benci produk itu bisa ke mana-mana," kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan. Bersamaan dengan itu, ia ingin agar ajakan untuk membenci produk-produk luar negeri disuarakan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Pernyataan Jokowi ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat luas. ● **mei**

DPR Dukung KPK Usut Dugaan Suap Pajak di Ditjen Pajak

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terkait pajak yang menjerat aparat sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Azis meminta KPK agar menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi petugas pajak dan wajib pajak agar kasus serupa tidak terulang," kata Azis, Minggu (7/3).

"Pegawai pajak harus menanamkan nilai-nilai profesional, berintegritas dan bersih dari unsur-unsur praktik korupsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan," ucapnya.

Azis meminta Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran di Ditjen Pajak. Apalagi, dalam masa pandemi Covid-19, seharusnya penerimaan negara dari pajak dapat digunakan untuk membantu masyarakat.

"Menkeu Sri Mulyani melalui Ditjen Pajak harus meningkatkan pengawasan terhadap para pegawai pajak terhadap mekanisme penerimaan pajak untuk mencegah adanya celah dan potensi penyalahgunaan, terutama di

tengah pandemi Covid-19 di mana hasil penerimaan pajak seharusnya dapat membantu masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah dua aparat sipil negara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bepergian ke luar negeri.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggara mengatakan, pencegahan itu dilakukan atas permintaan KPK.

"Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang ASN di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan empat orang lainnya atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3) lalu.

Arya menyebut, dua ASN yang dicegah tersebut berinisial APA dan DR serta empat orang lainnya, yaitu RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pria Wibawa pada 8 Februari 2021. "Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021," kata Arya. ● **mei**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



ATURAN PERLINDUNGAN HARGA UNTUK UMKM

Pekerja memproduksi sepatu wanita yang dipasarkan melalui jejaring digital (E-Commerce) di UMKM Anjani Shoes, Kampung Sedar Mulya, Desa Pagelaran, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/3). Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan larangan praktik monopoli jual rugi (Predator Pricing) guna menekan produk-produk luar negeri yang dijual dengan harga murah melalui jejaring digital (E-Commerce) yang selama ini banyak merugikan para pelaku UMKM dalam negeri.

Gelar Rapim Sikapi KLB, AHY Sebut Moeldoko Tak Terpuji dan Memalukan

Konflik di Partai Demokrat diprediksi akan berlangsung lama dan berujung ke pengadilan. Sebab AHY dan Moeldoko, tidak akan rela melepaskan jabatannya.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi ketua umum partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rapat pimpinan itu digelar di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/3). Dalam rapim itu, para kader Demokrat nampak memekikkan perlawanan terhadap hasil KLB.

AHY mengatakan, pengambilalihan paksa kursi pimp-

inan Demokrat bukan hanya ujian terhadap kedaulatan partai. Tetapi, kata dia, ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia. Pasalnya, aktor eksternal partai dalam hal ini Moeldoko justru didapuk menjadi pemimpinnya.

"Kali ini sungguh berbeda karena aktor eksternal yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional," ujarnya di lokasi.

AHY mengancam pelaksanaan KLB Demokrat tersebut. Ia menilai, Moeldoko yang ditetapkan menjadi ketua umum memiliki sifat tidak ber-

moral dan tidak berjiwa ksatria. Karena itulah, pihaknya akan melawan hasil KLB tersebut.

"Dinobatkan sebagai ketua umum PD versi KLB di Deliserdang Sumut, ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan di partai ini. Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK PD yang tidak sah itu," jelas AHY.

Kader Demokrat yang berada di lokasi pidato AHY pun memekikkan perlawanan. AHY pun menegaskan tidak akan mundur sejenak pun atas upaya pengambilalihan partai yang dipimpinnya tersebut.

"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa PD juga membunuh demokrasi di negeri kita," tutup AHY disambut teriakan kader.

Berlanjut ke Pengadilan

Konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat dipre-

diksi akan berlanjut hingga ke pengadilan. Sebab, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diyakini tidak akan rela melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat ke tangan Moeldoko.

Demikian pula dengan kubu Moeldoko. Mereka akan terus mempertahankan hasil KLB Deli Serdang, Medan, yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

Perubahan Partai Demokrat itu diyakini bakal terus berlanjut hingga adanya keputusan dari pengadilan.

Demikian diprediksi Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menanggapi kisruh Partai Demokrat.

"Kalau belajar pengalaman

dari partai-partai lain yang mengalami dualisme kepemimpinan, akan berproses di pengadilan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tinggi, dalam hal ini dalah MA," kata Qodari, Minggu (7/3).

Jika merujuk dari pengalaman partai lain yang pernah mengalami dualisme, Qodari menilai proses penyelesaian kisruh Partai Demokrat akan memakan waktu yang cukup lama, bisa setahun. Hal itu akan terjadi jika penyelesaiannya dilakukan lewat cara pengadilan.

"Jadi nanti kalau sudah keluar keputusan dari MA baru akan disahkan oleh departemen kehakiman. Dan selanjutnya, atas dasar departemen kehakiman itu, maka akan berproses di KPU," beber Qodari. ● **han**

Tahanan Wanita Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Palu Kabur

PALU (IM) - Seorang tahanan wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah kabur. Tahanan bernama Melvira alias Ira, diketahui kabur pada Jumat (5/3), sekitar pukul 06.00 Wita.

Menurut Gusti Noviyanto, salah satu staf Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Perempuan Palu, petugas baru menyadari ada tahanan kabur saat pergantian jaga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, tahanan ini kabur melalui pagar dan kemudian menaiki atap Lapas Perempuan Palu. "Dia naiknya lewat pagar samping jadi tidak ada yang melihat, dia naik pagar terus naik ke atap kantor dan melompat ke bawah," ujar Gusti, Minggu (7/3).

Gusti menjelaskan bahwa tahanan dengan kasus narkoba ini baru satu bulan yang lalu

masuk di Lapas Perempuan Palu, dan masih berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

"Tahanan Kejaksaan Negeri Parigi, kasusnya kemarin di sana," ujarnya pula.

Saat ini pihak Lapas Perempuan Palu masih melakukan pengejaran dan menetapkan tahanan tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun hingga Minggu, tahanan tersebut belum berhasil diamankan.

"Kami sudah cari ke rumah orang tuanya tapi tidak ada, sudah koordinasi juga dengan pihak kepolisian," ujarnya pula.

Tidak hanya itu, informasi identitas diri serta ciri-ciri dari tahanan tersebut telah dipublikasikan di sejumlah media sosial untuk membantu prosen pencarian. "Jika melihat orang tersebut bisa langsung hubungi kami," ujar Gusti pula. ● **mei**

Aparat Gagalkan Pengiriman 23.942 Benih Lobster

JAKARTA (IM) - Aparat gabungan menggagalkan pengiriman 23.942 benih bening lobster (BBL) atau benur dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paket disamaran sebagai sprai dan kaus ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKI, Rina mengungkap, benur tersebut akan dikirimkan ke Tanjung Pinang melalui kargo pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA286.

"Alhamdulillah, berkat sinergi koordinasi, kerja sama dan komunikasi, dukungan

dari instansi terkait serta stakeholder (pemangku kepentingan) di lingkungan bandara, kami berhasil menggagalkan pengiriman benih bening lobster pada Jumat, 5 Maret kemarin," kata Rina, Minggu (7/3).

Rina menyebut pengirim menyamaran aksinya dengan menuliskan produk garmen seperti sprai, kaus dan celana pada karung kemasan yang hendak dikirim. Namun, lanjut Kepala BKIPM, petugas menemukan sesuatu yang mencurigakan saat paket tersebut melewati sinar x-ray.

Alhasil, petugas membuka karung tersebut dan ditemukan benur yang dikemas dengan

kardus dan koper. Saat dibuka, ditemukan 30 kantong BBL dan 5 botol es batu.

"Masing-masing kantong berisi 800 ekor benur yang terbagi dalam 1 kantong berisi 584 ekor jenis pasir dan 158 ekor jenis mutiara," ujar Rina.

Petugas BKIPM langsung menyita dan melakukan penanganan BBL tersebut lebih lanjut untuk disegarkan (reoksigan).

Rina memastikan bahwa jajarannya bersama aparat kepolisian masih memburu pengirim komoditas yang dilarang untuk dilululintaskan tersebut. "Terduga yang mengirim benih bening lobster masih dalam pencarian," katanya. ● **han**



PART OF THE HEINEKEN COMPANY

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
KAS	633.253	77.797	UTANG USAHA	172.781	128.702
PIUTANG USAHA			PIHAK KETIGA	1.470	10.341
PIHAK KETIGA	336.035	858.299	PIHAK BERELASI		
PIHAK BERELASI	738	2.352	PINJAMAN JANGKA PENDEK	300.000	300.000
PERSEDIAAN	171.037	165.633	PIHAK BERELASI		
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	36.658	53.757	BANK		
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR DI MUKA	1.656	-	UTANG PAJAK		
ASET DERIVATIF	1.858	-	PAJAK PENGHASILAN BADAN	42.334	94.510
ASET LANCAR LAINNYA	8.026	4.964	PAJAK-PAJAK LAINNYA	17.974	45.936
JUMLAH ASET LANCAR	1.189.261	1.162.802	JAMINAN EMBALASI	172.182	225.582
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS DERIVATIF	320	565
ASET TETAP	1.479.447	1.559.289	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PENDEK	625.917	733.057
ASET HAK-GUNA	24.330	-	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.338.441	1.588.693
ASET PAJAK TANGGUHAN	93.039	89.330	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.338.441	1.588.693
KLAIM PENGEMBALAN PAJAK	103.036	57.892	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	18.312	27.637	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	96.961	123.463
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.718.164	1.734.148	LIABILITAS IMBALAN KERJA	12.419	13.220
JUMLAH ASET	2.907.425	2.896.950	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PANJANG	20.528	25.567
			LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	5.670	-
			JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	135.578	162.250
			JUMLAH LIABILITAS	1.474.019	1.750.943
			EKUITAS		
			Modal saham - nilai nominal Rp 10		
			(dalam Rupiah penuh) per saham		
			Modal dasar - 2.107.000.000 saham	21.070	21.070
			Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh -	1.802	1.802
			2.107.000.000 saham		
			TAMBAHAN MODAL DISETOR	26	16
			SALDO LABA	1.410.082	1.122.644
			Ditentukan penggunaannya		
			Tidak ditentukan penggunaannya	1.432.980	1.145.532
			Ekuitas yang dapat diatribusikan	426	475
			kepada pemilik entitas induk	1.433.406	1.146.007
			Kepentingan nonpengendali		
			JUMLAH EKUITAS	1.433.406	1.146.007
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.907.425	2.896.950

Catatan:
Laporan Keuangan Konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	1.985.009	3.711.405
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.044.783)	(1.426.351)
LABA KOTOR	940.226	2.285.054
Beban penjualan	(257.864)	(367.927)
Beban umum dan administrasi	(191.970)	(207.854)
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	(62.605)	(60.508)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	5.061	(4.171)
	(507.378)	(640.460)
LABA OPERASI	432.848	1.644.594
Beban keuangan	(63.650)	(44.576)
Pendapatan keuangan	27.272	26.594
BEBAN KEUANGAN BERSIH	(36.378)	(17.982)
LABA SEBELUM PAJAK	396.470	1.626.612
Beban pajak penghasilan	(110.853)	(420.553)
LABA	285.617	1.206.059
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	3.781	1.353
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	(756)	(338)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3.025	1.015
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	288.642	1.207.074
JUMLAH LABA (RUGI) BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	285.666	1.205.743
Kepentingan nonpengendali	(49)	316
	285.617	1.206.059
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	288.690	1.206.758
Kepentingan nonpengendali	(48)	316
	288.642	1.207.074
Labas dasar per saham (dalam nilai penuh)	136	572

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.455.900	3.465.660
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.300.113)	(1.663.678)
Kas dihasilkan dari operasi	1.155.787	1.801.982
Penerimaan bunga	27.272	26.594
Pembayaran bunga	(63.736)	(44.558)
Pembayaran pajak penghasilan	(246.674)	(456.918)
Penerimaan pengembalian pajak	-	7.424
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	872.649	1.334.524
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(255.406)	(322.284)
Hasil penjualan aset tetap	2.712	1.984
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(252.694)	(320.300)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen tunai	(500)	(1.224.323)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.999)	-
Penerimaan utang bank jangka pendek	1.500.000	1.930.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(1.550.000)	(1.950.000)
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(64.499)	(1.244.323)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	555.456	(230.099)
KAS AWAL TAHUN	77.797	307.896
KAS AKHIR TAHUN	633.253	77.797

Jakarta, 8 Maret 2021

Direksi

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK